



## **Upaya Tiongkok Dalam Mempertahankan Provinsi Xinjiang Ditengah Tekanan Internasional**

**Ryseldha Claudya Purba**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Diponegoro  
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269  
Website <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip.undip.ac.id](mailto:fisip.undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

*The Chinese region has a diversity of tribes and cultures that are rarely known internationally. One of them is the Uyghurs which has recently received international attention. After Xinjiang was appointed as an autonomous region of China, relations between the Chinese government and the Uyghurs deteriorated since the merngence of the nationalist movement which made the situation in Xinjiang even more insecure. These nationalist movements include terrorism, separatism, and religious extremism. The purpose of this study is to provide another perspective in looking at the Xinjiang conflict which is from the point of view of the Chinese government. This study uses qualitative methods with secondary data sources, which are then analyzed using the concepts of National Interest, Hegemony, Conflict Dynamics, and theories of Conflict Causes. The results of this research indicate that the efforts of the Chinese government in maintaining hegemony in Xinjiang province are not for religious or cultural discrimination as is known by the international world, but rather are aimed at strengthening national interest namely maintaining regional security and preventing the development of nationalist movements by establishing the establishment of a Center for Education and Training Work*

**Keywords:** *China, the Uyghurs, Xinjiang, National Interest, Religious Extremism*

### **PENDAHULUAN**

Republik Rakyat Tiongkok adalah sebuah negara yang berada diwilayah Asia Timur yang menjadi salah satu negara industry maju bersama dengan Jepang dan Korea Selatan. Dengan wilayah yang luas ini membuat sebagian dari wilayah Tiongkok ada yang berbatasan dengan negara eropa, akibat dari kondisi geografis tersebut membuat penduduk Tiongkok menjadi lebih bervariasi karena terjadinya perkawinan silang. Dari perkawinan ini membuat suku yang ada di Tiongkok lebih beragam, salah satunya yaitu suku Uighur. Suku ini merupakan keturunan dari suku kuno yaitu Kerajaan Kekhanan Uighur yang tersebar di Asia Tengah dan memeluk agama islam. Populasi dari suku Uighur juga tersebar hingga Kazakhstan, Kyrgystan dan Uzbekistan. Suku Uighur menganggap mereka secara budaya dann etnis lebih dekat dengan negara dari Asia tengah. Suku Uighur menggunakan bahasa Uighur yang merupakan turunan dari bahasa Turki. Pada sekitar abad ke 8 sampai ke 9 Masehi, Xinjiang pernah dipimpin oleh

Kekaisaran Kekhanan Uighur. Pada saat itu masyarakat etnis Uighur dijuluki “Orang-orang Turkic”. Pada 1933 dan 1944 wilayah ini berhasil memerdekakan kembali Republik Turkistan Timur namun kejayaannya tidak bisa bertahan lama sebab ditahun 1949, wilayah ini berhasil diambil oleh pemerintah Tiongkok dan mengubah nama wilayah tersebut menjadi Xinjiang, yang berarti “Batas Baru” (CNNIndonesia.com, 2018).

*Gambar 1.* Peta Provinsi Xinjiang



*Sumber: (Thinglink, 2016)*

Pada saat dikuasai oleh Dinasti Qing, Kerajaan Islam Uighur Turkistan Timur mendapat tempat terhormat bahkan mampu memberikan kontribusi besar bagi Tiongkok. Suku Uighur memberikan warisan budaya kepada Tiongkok melalui karangan buku, music dan seni akrobat. Hubungan antara Tiongkok dengan suku Uighur semakin memburuk ketika suku Han mulai migrasi secara besar-besaran ke daerah Xinjiang. Semanjak kedatangan suku Han, suku Uighur merasa tersisihkan dan tidak lagi mampu mendominasi daerah tersebut. Dikarenakan mereka harus bersaing dengan suku Han. Akibat dari itu banyak masyarakat dari suku Uighur harus kehilangan pekerjaan dan jatuh dalam kemiskinan (Authenticated U.S.Government Information, 2007). Hal tersebut menimbulkan pertentangan di kalangan masyarakat suku Uighur. Kerusuhan pecah, ketika mereka melakukan penyerangan terhadap polisi menjelang Olimpiade 2008 (BBCIndonesia.com, 2009). Ketegangan diantara kedua belah pihak terus terjadi sampai sekarang. Untuk menjaga agar wilayah Provinsi Xinjiang agar tetap aman dan damai, pemerintah Tiongkok membentuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kerja. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kerja mulai beroperasi pada tahun 2013 ini bertujuan untuk melawan ekstremisme dan teroris yang ada di wilayah Xinjiang. Pembentukan kamp ini menimbulkan respon internasional. Karena pembentukan kamp tersebut, dunia internasional mendesak untuk menghentikan aktivitas kamp pendidikan ulang diantara lain 22 delegasi negara di PBB dari Uni Eropa, termasuk Australia, Selandia Baru, Jepang dan Kanada menandatangani surat yang memprotes kampo pendidikan ulang di Xinjiang (Saputra Y. E., Tempo, 2019). Selain itu pemerintah Amerika melalui Departemen Perdagangan Amerika telah memasukkan 28 entitas Tiongkok kedalam daftar hitam (blacklist). Alasan Amerika melakukan ini karena 28 entitas ini menurut mereka telah melakukan pendidikan terhadap suku Uighur (Kompas.com, 2019). Tiongkok berusaha untuk mempertahankan provinsi Xinjiang dari kegiatan – kegiatan yang mampu menimbulkan

keributan dan perpecahan di wilayah tersebut. Sebab tidak ada suatu negara yang menginginkan sebuah provinsinya untuk lepas dari daerah kekuasaannya.

## **PEMBAHASAN**

Pada tahap evolusi sejarah, suku Uighur mendirikan beberapa kerajaan diantara lain: Kerajaan Kekhanan Uighur didirikan di Khanghaj pada tahun 323 yang berdiri selama 200 tahun; Kerajaan Kekhanan Uighur didirikan pada tahun 523 yang berdiri selama 80 tahun; dan Kerajaan Kekhanan Uighur tahun 744 (Issiyev, n.d). Kerajaan Kekhanan Uighur pada awalnya memiliki hubungan yang baik dengan Dinasti T'ang, namun hubungan diantara keduanya mulai dihiasi dengan konflik semenjak terjadinya pemberontakan An Lu Shan. Pemberontakan ini bertujuan untuk menggulingkan Dinasti T'ang. Pada masa itu, Kerajaan Kekhanan Uighur memeluk 3 agama yaitu diantara lain Manichaeisme, Buddhisme, Kristen Nestorian (Mackerras, 2008). Setelah kerajaan Kekhanan Uighur runtuh, suku Uighur sering berpindah tempat sampai akhirnya memutuskan untuk menetap di wilayah oasis utara Gunung Taklamakan. Pada saat dikuasai oleh Dinasti Qing, hubungan antara Kekaisaran Tiongkok dengan suku Uighur berada di hubungan yang sangat baik. Suku Uighur mendapat tempat terhormat selama masa Dinasti Qing. Namun hal itu tidak bertahan lama karena pada tahun 1911, pemerintah nasionalis Tiongkok mengambil alih wilayah Dinasti Qing dan suku Uighur (The Uyghur American Association, 2012). Karena hal tersebut membuat suku Uighur berusaha untuk melepaskan diri dari Tiongkok dan berhasil sebanyak 2 kali yaitu di tahun 1933 dan 1944, suku Uighur berhasil memproklamasikan Republik Turkistan Timur (Radio Free Asia, 2009). Tetapi kejayaan Republik Turkistan Timur tidak bertahan lama karena di tahun 1949, pemerintah nasionalis Tiongkok berhasil mengambil alih dan mengganti nama wilayah tersebut menjadi Xinjiang yang artinya "Batas Baru". Setelah menunjuk Xinjiang sebagai wilayah otonomi Tiongkok, Tiongkok juga memutuskan untuk melakukan migrasi terhadap suku Han ke wilayah Xinjiang. Karena keputusan Tiongkok tersebut, membuat suku Uighur semakin tidak menyukai Tiongkok. Suku Uighur merasa dengan kedatangan suku Han ke provinsi Xinjiang membuat suku Uighur merasa tersingkirkan dari wilayah mereka sendiri tersebut dan harus bersaing dalam mendapatkan pekerjaan. Atas kejadian ini menjadi pemicu munculnya rasa ketidakadilan bagi suku Uighur.

Semenjak tahun 1990, hubungan antara suku Uighur dengan Tiongkok mencapai tahap kekerasan. Dapat terlihat dari banyaknya pemberontakan senjata yang menjadi tanda perjuangan suku Uighur untuk melepaskan diri dari Tiongkok (Wardhani, 2011). Pemberontakan ini dipengaruhi oleh kelompok teroris. Pemberontakan ini terjadi hingga tahun 1996, yang ikut disertai dengan pengeboman, menyandera warga sipil, mengancurkan mobil hingga memunuh polisi. Hubungan diantara keduanya mencapai puncak dari konflik ini, dimulai dari tahun 1997 hingga tahun 2016. Dimana ditahun 1997 terjadi demonstrasi besar-besaran di wilayah Xinjiang. Tidak hanya melakukan demonstrasi, tetapi juga menyerang Tentara Pembebasan Rakyat (Human Right Watch, 2001) dan melakukan pengeboman. Hingga kejadian yang paling mendapat sorotan dari media internasional ketika terjadinya protes keras menjelang Olimpiade Beijing di tahun 2008 dan kerusuhan di tahun 2009 yang terjadi di Urumqi. Dari kejadian kerusuhan di Urumqi mengakibatkan sekitar 200 orang tewas dan 1700 orang terluka (BBC.com, 2014). Kelompok teroris, separatisme dan ekstrimisme ini tetap melakukan aksinya mulai dari melakukan penusukan kepada polisi dan warga sipil pada Maret 2014 (BBC.com, 2014), melakukan serangan kepada para pekerja tambang batu pada 28 September 2015, pelaku melakukan bom bunuh diri di Kedutaan Besar Tiongkok di Kirgistan pada 30 Agustus 2016 dan pada 28 Desember 2016, empat teroris menabrak halaman pemerintah daerah Moyu dan meretas

karyawan serta melempar bom rakitan yang menewaskan seorang pejabat pemerintahan dan seorang petugas keamanan serta tiga orang lainnya mengalami cedera (Xin, Xinjiang in Safest Period, wounds healing after three peaceful years, 2019). Sejak serangan teroris terakhir yang terjadi di wilayah Moyu, Provinsi Xinjiang berada dalam situasi yang dikatakan mulai stabil. Situasi tersebut terjadi karena Tiongkok memutuskan untuk mendirikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kerja dan mulai mengoperasikannya. Semenjak pendirian Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kerja, aktivitas dari gerakan kelompok nasionalis seperti Terorisme, Separatisme dan Ekstrimisme agama mengalami penurunan. Beberapa upaya lain yang dilakukan oleh Tiongkok dalam menjaga kestabilan Provinsi Xinjiang diantara lain pertama, provinsi Xinjiang menerapkan pemeriksaan keamanan yang lebih ketat. Meskipun pada awalnya masyarakat merasa tidak nyaman namun secara bertahap masyarakat menyadari bahwa semua yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan keamanan dan keselamatan publik. Upaya ini membuahkan hasil sebab selama tiga tahun, penduduk merasakan keamanan dalam sejarah kehidupan di Xinjiang dan hasil lainnya adalah ekonomi masyarakat telah membuahkan hasil dari stabilitas keadaan di wilayah Xinjiang mulai terjadi (Xin, Global Times, 2019). Hingga saat ini, anggota kelompok separatisme “Turkistan Timut” masih ada disekitar masyarakat. Dapat dilihat dari tagar yang beredar dalam media social Facebook dan Twitter “#StillNoInfo”, dari tagar tersebut banyak orang Uighur yang tinggal di luar negeri memposting foto dan nama, kemudian mengklaim kerabat atau teman mereka tidak dapat dihubungi. Tetapi setelah dicari tahu kebenarannya oleh pihak berwenang dan wartawan Global Times bahwa orang yang masuk dalam daftar “orang hilang” tersebut sebenarnya telah menjalani kehidupan normal seperti sudah mulai bekerja dan berkumpul kembali dengan keluarga. Selain itu mereka juga menemukan bahwa tokoh yang terlibat dalam memulai kegiatan untuk menemukan “orang Uighur yang hilang” di media sosial luar negeri adalah anggota kelompok dari separatis “Turkistan Timur”, selain itu upaya yang mereka lakukan merupakan upaya baru untuk merusak citra kebijakan Tiongkok (Jie & Juecheng, 2019).

Beberapa faktor yang menjadi penyebab konflik antara suku Uighur dengan Tiongkok diantara lain pertama, struktural. Faktor struktural yang lebih dibahas adalah mengenai masalah keamanan dalam negeri Tiongkok. Dikarenakan masih adanya kelompok yang menginginkan berdirinya Republik Turkistan Timur, maka Tiongkok harus terus berusaha untuk menjaga keutuhan dan keamanan Provinsi Xinjiang. Apabila hal tersebut tidak dijaga dengan baik oleh Tiongkok maka akan menimbulkan munculnya gerakan-gerakan nasionalis lain dari negara yang masih berkonflik dengan Tiongkok seperti Tibet, Mongolia dan Taiwan. Kedua, politik. Tiongkok merupakan salah satu negara yang memiliki peradaban tertua di dunia sehingga membuat Tiongkok memiliki catatan sejarah yang panjang dan dinamika politik yang beragam. Kepentingan utama dari Tiongkok adalah kedaulatan. Dengan begitu bahwa Tiongkok tidak akan pernah membiarkan satu wilayahnya untuk lepas dari Tiongkok, hal ini juga berlaku bagi Provinsi Xinjiang. Memanasnya hubungan antara Suku Uighur dengan Pemerintah Tiongkok juga disebabkan dengan adanya gerakan-gerakan nasionalis yang menginginkan kemerdekaan Republik Turkistan Timur di Xinjiang. Kelompok ini menunjukkan eksistensi kegiatan mereka, sehingga membuat Tiongkok tidak bisa membiarkan kelompok ini semakin meluas dan menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang lebih besar. Ketiga, ekonomi. Semenjak Pemerintahan Tiongkok memutuskan untuk melakukan migrasi besar-besaran terhadap suku Han ke Provinsi Xinjiang membuat suku Uighur merasakan persaingan yang ketat di Provinsi Xinjiang. Karena Suku Uighur kalah bersaing di dalam penerimaan lapangan pekerjaan menimbulkan kesenjangan ekonomi diantara Suku Uighur dan Suku Han. Dari kesenjangan

sosial ini memicu pertentangan diantara kedua suku. Dan yang terakhir, budaya. Secara historis, masyarakat Uighur merasa bahwa mereka memiliki perbedaan identitas dengan Tiongkok. Suku Uighur banyak dipengaruhi oleh budaya dari Asia Tengah seperti Kazakhstan, Tajikistan, Kirghiztan, Pakistan, Turki. Mereka juga berkeyakinan bahwa suku Uighur di Provinsi Xinjiang adalah keturunan Turki sehingga membuat mereka selalu berusaha untuk memerdekakan diri dan memisahkan diri dari Pemerintahan Tiongkok. Akibat dari perbedaan budaya yang dirasakan oleh suku Uighur menimbulkan kekhawatiran dalam diri suku Uighur akan hilangnya identitas budaya mereka. Karena kekhawatiran mereka itulah semakin mengeraskan sikap Uighur untuk menolak sejalan dengan Tiongkok. Hingga sekarang diantara Pemerintahan Tiongkok dan suku Uighur masih sulit untuk hidup berdampingan secara damai sehingga masih sering terjadi gesekan-gesekan.

Dalam upaya Tiongkok mengatasi terorisme, separatisme dan ekstrimisme agama dengan membentuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kerja mendapat respon dari internasional yang berupa tekanan. Tekanan dari internasional yang diberikan sebagai berikut pertama, surat protes. Pada Juli 2019, 22 negara di PBB melakukan langkah yang tidak biasa yaitu mengeluarkan sebuah pernyataan yang menyerukan agar Tiongkok mengakhiri penahanan sewenang-wenang dan pelanggaran lainnya terhadap hak-hak muslim di wilayah Xinjiang (Garside & Harrison, 2019). Surat protes ini diberikan karena menurut mereka Tiongkok telah melakukan penahanan 1 juta orang yang kebanyakan adalah suku Uighur di kamp-kamp pengasingan (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kerja) dan untuk memberikan akses kepada para pengamat internasional untuk mengunjungi kam-kamp penahanan (The Economist, 2019). Surat itu berisi diantara lain puluhan Dubes dari berbagai negara - negara tersebut menyerukan agar otoritas Tiongkok untuk mengentikan penahanan secara sewenang-wenang terhadap warga Uighur (Saputra Y. E., Tempo, 2019) dan puluhan Dubes ini mendorong Tiongkok agar memberikan kebebasan pergerakan bagi warga suku Uighur dan warga muslim lainnya dan kelompok minoritas lainnya di Xinjiang (Voa Indonesia, 2019). Kedua, Amerika blacklist beberapa perusahaan dari Tiongkok. Departemen Perdagangan Amerika Serikat telah memasukkan 28 entitas dari Tiongkok ke dalam daftar hitam (blacklist). Amerika mengambil langkah ini karena mereka menganggap bahwa 28 perusahaan ini telah melakukan tindak penindasan terhadap suku Uighur dan telah melanggar Hak Asasi Manusia. Amerika kembali menambahkan daftar perusahaan yang masuk dalam daftar hitam yaitu sebanyak 33 perusahaan (Pramadiba, 2020). Alasan Amerika menambahkan adalah karena Amerika menganggap bahwa mereka terlibat dalam operasi mata-mata Uighur atau pengembangan senjata pemusnah massal untuk militer Tiongkok dan mereka menganggap juga bahwa Tiongkok telah bertindak represif, tidak adil, dan menerapkan pengawasan teknologi canggih terhadap komunitas Uighur. Kemudian, Amerika kembali menambahkan jumlah perusahaan yang diblacklist. Alasan mereka memasukkan sebelas perusahaan tersebut karena mereka berkeyakinan bahwa 11 perusahaan tersebut telah terlibat dalam pelanggaran HAM terhadap suku Uighur di Provinsi Xinjiang khususnya dalam penerapan kerja paksa dan suku minoritas lain. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak akan dapat membeli barang dari perusahaan asal Amerika tanpa persetujuan pemerintah Amerika Serikat.

Ketiga, kritik dari PBB. Anggota PBB meminta untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial. Dasar dari permintaan anggota PBB ini didapat dalam sebuah laporan yang menunjukkan bahwa Tiongkok telah mengubah otonomi wilayah Uighur menjadi sesuatu yang menyerupai kamp interniran besar-besaran. Dapat disimpulkan kritik dari PBB berupa definisi luas terorisme dan referensi samar-samar keekstrimisme dan definisi separatisme yang tidak jelas dalam undang-undang China (BBC, 2018). PBB meminta beberapa hal kepada Tiongkok diantara lain

mengakhiri praktik penahanan tanpa dakwaan, pengadilan dan hukuman yang sah; segera membebaskan orang-orang yang saat ini ditahan dalam keadaan seperti ini; memberikan jumlah orang yang ditahan serta alasan penahanan mereka; melakukan “investigasi yang tidak memihak terhadap semua tuduhan profil ras, etnis, dan etnis-agama” (BBC, 2018). Michelle Bachelet selaku pejabat tinggi PBB menekan agar lembaga global ini diberikan akses masuk ke kamp-kamp untuk menyelidiki apakah benar tuduhan yang diberikan yaitu pelanggaran hak asasi manusia tersebut benar terjadi didalam kamp tersebut (Westcott & Shelley, 2019). Keempat, Amerika membuat *The Uyghur Act 2019* . Pada Juni 2020, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menandatangani undang-undang yang telah disahkan dan mendapat dari dukungan Kongres, yang berpesan bahwa setia individu yang terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia di Xinjiang akan diberikan sanksi karena telah menindas warga suku Uighur. Undang-undang ini juga mewajibkan kepada pelaku bisnis dan setiap individu Amerika Serikat yang menjual produk atau yang beroperasi di wilayah Xinjiang agar memastikan apakah aktivitas si pembeli produk berkontribusi atau terlibat pada pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kerja paksa (Maizlan, 2020). Dewan Perwakilan Rakyat Amerika mendukung pembuatan RUU yang dapat menjatuhkan sanksi pada pejabat Tiongkok (Buckley & Ramzy, 2019). Tujuan dari UU ini adalah untuk mengatasi pelanggaran HAM skala besar-besaran, termasuk penahanan massal sebanyak 1 juta orang dari suku Uighur (BBC Indonesia, 2019). Dan yang terakhir, sikap Uni Eropa terhadap kebijakan Tiongkok. Inggris mendesak Tiongkok agar memberikan akses kepada PBB untuk masuk kedalam pusat-pusat tersebut dengan memberikan akses secara langsung dan tidak terbatas yang telah menahan satu juta warga suku Uighur dan minoritas muslim lainnya yang ditahan tanpa ada pengadilan. Brussel sebagai salah satu perwakilan dari Uni Eropa, juga memberikan tanggapan atas pusat pendidikan dan pelatihan kerja ini, bahwa sangat tidak suka atas konsep “*political re-education camps*” dan mereka akan terus mengangkat masalah pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dengan para pejabat Tiongkok.

Setelah mendapat beberapa tekanan dari Internasional, Tiongkok menanggapi tekanan-tekanan tersebut dimulai dari memberikan penegasan bahwa Pusat pendidikan dan Pelatihan Kerja tidak melanggar HAM dari suku Uighur. Tiongkok juga menerbitkan tiga *white paper* terkait isu suku Uighur di Xinjiang, diantara lain Perlawanan terhadap Terorisme dan Ekstrimisme dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Xinjiang, Hal mengenai Sejarah Xinjiang, dan Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan di Xinjiang (Saputra Y. E., Tempo.co, 2019). Tiongkok merespon bahwa para anggota parlemen dan media berita Barat telah memfitnah kebijakan pemerintah dan memicu perselisihan etnis di Xinjiang. “*crude meddling in China’s internal affairs*” disampaikan pada saat konferensi pers di Beijing oleh Shohrat Zakir, Ketua pemerintah Xinjiang (Buckley & Ramzy, 2019). Sebab fasilitas yang diberikan sangat baik dan bertujuan sebagai pusat pelatihan kejuruan. Selain itu Pemerintah Tiongkok menunjukkan sebuah video kepada wartawan yang berisi tentang serangan 2014 oleh militan Uighur di stasiun kereta api di Kunming, barat daya Tiongkok, yang telah menewaskan 31 orang dan melukai 141 orang lainnya (Buckley & Ramzy, 2019). Pemerintah Tiongkok juga mengatakan bahwa dokumen yang bocor ke luar adalah sebuah dokumen palsu dan menyatakan bahwa kamp tersebut adalah pusat pendidikan dan pelatihan kerja (Maizlan, 2020). Tiongkok mengundang perwakilan dari NU, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada bulan Februari 2019, untuk berkunjung ke Xinjiang dan didanai oleh Tiongkok (Amindomi, 2019). Tidak hanya perwakilan dari Indonesia saja tetapi juga delapan pejabat dari Organisasi Kerja Sama Islam dalam tur 10 hari di Xinjiang termasuk kunjungan ke beberapa fasilitas tertentu (Perlez, 2019).

Dalam upaya menangani ekstrimisme, terorisme dan separatisme berpegang pada prinsip supermasi hukum dan pendekatan yang berbasis hukum. hukum yang mengatur tentang terorisme terdiri dari Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok, Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok, Hukum Acara Pidana Republik Rakyat Tiongkok, Hukum Keamanan Nasional Republik Rakyat Tiongkok, Undang-Undang Anti-Terorisme Republik Rakyat Tiongkok, Peraturan Urusan Agama dan Pendapat tentang Masalah-Masalah Tertentu Mengenai Penerapan Hukum dalam Menangani Kasus Pidana yang Melibatkan Terorisme dan Ekstremisme yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Keamanan Publik, dan Kementerian Kehakiman (The State Council The People's Republic Of China, 2019). Xinjiang memberlakukan peraturan lokal termasuk Peraturan Daerah Otonomi Xinjiang Uyghur tentang Urusan Agama, Tindakan Daerah Otonomi Xinjiang Uyghur Tentang Penerapan Hukum Anti-Terorisme Republik Rakyat Tiongkok, dan Peraturan Daerah Otonomi Xinjiang Uyghur tentang De-Radikalisasi (The State Council The People's Republic Of China, 2019).

Selain upaya hukum, Tiongkok juga mengambil langkah deradikalisasi kelompok terorisme, ekstrimisme, dan separatisme dengan membentuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kerja. Peserta yang mengikuti pelatihan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan dibagi menjadi tiga kategori di antara lain pertama, orang yang dihasut, dipaksa atau orang yang berpartisipasi dalam kegiatan teroris, ekstremis dalam keadaan yang tidak cukup serius untuk membentuk kejahatan. Kedua, orang-orang yang dihasut, dipaksa atau orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan teroris, ekstremis yang menimbulkan bahaya nyata, yang kesalahan subjektifnya tidak dalam, yang membuat pengakuan dari kejahatan mereka dan menyesal tentang tindakan masa lalu mereka dan dengan demikian dapat dibebaskan dari hukuman sesuai dengan hukum, dan yang telah menunjukkan kesediaan untuk menerima pelatihan. Dan yang terakhir, orang-orang yang dihukum dan menerima hukuman penjara karena kejahatan teroris atau ekstremis dan setelah menjalin hukuman mereka, telah dinilai masih berpotensi mengancam masyarakat, dan yang telah diperintahkan oleh pengadilan rakyat untuk menerima pendidikan di pusat-pusat tersebut sesuai dengan hukum (The State Council The People's Republic Of China, 2019). Masyarakat yang menjadi peserta pelatihan mengikuti berbagai kursus di antara lain bahasa mandarin, pelatihan tentang ketrampilan profesional dan pengetahuan hukum. Pusat-pusat pelatihan ini dilengkapi dengan fasilitas yang baik. Di pusat pelatihan ini, kesehatan mental para peserta sangat dijaga selain itu pelatihan ini menawarkan layanan konseling psikologis, dan membantu memecahkan masalah di kehidupan nyata (The State Council The People's Republic Of China, 2019). Tiongkok mengungkapkan bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kerja yang didirikannya adalah bagian dari kampanye untuk mengurangi terorisme, ekstrimisme agama dan separatisme.

Tiongkok memiliki kepentingan nasional yang ingin dicapai dan didapat demi menjaga kemakmuran serta keharmonisan warganya. Beberapa kepentingan nasional Tiongkok terhadap Provinsi Xinjiang di antara lain pertama, Ekonomi. Dikarenakan letak provinsi Xinjiang yang strategis, membuat provinsi ini penting bagi Tiongkok. Tiongkok menggunakan provinsi Xinjiang sebagai jalur perdagangan dan jalur penghubung antara Asia, Eropa dan Timur Tengah. Tidak hanya letaknya yang strategis sebagai jalur perdagangan, Xinjiang juga kaya akan sumber daya alam didalamnya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang tersedia di Xinjiang di antara lain gas alam, batu bara dan fosil yang dimiliki oleh Xinjiang mewakili 20% dari total cadangan energi Tiongkok, sehingga menjadikannya sebagai sumber bahan bakar fosil terbesar di Tiongkok (Zhao, 2019). Juga menghasilkan emas, perak, minyak, dan mineral yang terdapat di cekungan besar di antara lain Tarim, Junggar dan Turpan, logam nonferrous, logam

langka dan tambang non-logam (Global Times, 2011). Kedua, Territorial. provinsi Xinjiang merupakan posisi kunci untuk keberlangsungan kerja sama antara Tiongkok dengan negara disekitar Xinjiang. Jika identitas Uighur semakin kuat maka akan mampu menimbulkan ancaman bagi Tiongkok itu sendiri yaitu Uighur berusaha untuk melepaskan diri dari Tiongkok dan jika hal itu terjadi maka akan menimbulkan gerakan-gerakan nasionalis lain yang memiliki tujuan yang sama dengan suku Uighur yaitu melawan pemerintah Tiongkok untuk memerdekakan diri. Oleh sebab itu Tiongkok akan berusaha untuk terus menegakkan kedaulatannya di Provinsi Xinjiang. Untuk menjaga integritas wilayah Xinjiang, Tiongkok berupaya dengan cara yaitu pertama, melakukan hubungan diplomatik dengan Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan dan Rusia dengan membentuk “*Group of Five*” (Wardhani, Respon China atas Gerakan Pan-Uyghuris di Provinsi Xinjiang, 2011), mendirikan Xinjiang Production Construction Company (XPCC), dan memutuskan untuk melakukan migrasi suku Han ke provinsi Xinjiang. Dan yang terakhir, Keamanan wilayah. Dikarenakan di provinsi Xinjiang terdapat gerakan separatisme, ekstrimisme agama dan kelompok terorisme yang mampu mengancam keamanan wilayah. Jika keadaan di Xinjiang tidak segera ditangani maka akan berdampak pada kestabilan keamanan domestik selain itu juga mampu mengancam integritas wilayah Tiongkok di masa yang akan datang.

Apabila Tiongkok gagal dalam menjaga keamanan Xinjiang dan wilayah perbatasannya maka akan menimbulkan masalah keamanan wilayah dan sudut pandang negara lain terhadap Tiongkok. Jika gerakan teroris ini tidak berusaha untuk dihilangkan maka akan kemungkinan suku Uighur memerdekakan diri dengan cara ini. Apabila ini terjadi maka akan mengancam integritas territorial Tiongkok dan memicu daerah otonom lainnya untuk melakukan hal serupa. Tidak hanya untuk mempertahankan kepentingan nasional Tiongkok di Xinjiang tetapi juga berusaha untuk mempertahankan hegemoni mereka di wilayah tersebut. Hegemoni yang ingin dijaga oleh Tiongkok adalah kekuasaan mereka dalam wilayah Xinjiang tetap terjaga dengan mendorong masyarakat suku Uighur agar mau mematuhi dan mengikuti segala bentuk peraturan yang telah dibuat. Upaya yang mereka ambil juga merupakan bentuk sikap suatu negara dalam melaksanakan kewajiban dalam mempertahankan keamanan dan keutuhan wilayahnya. Sebab tidak ada satu negarapun yang menginginkan wilayahnya untuk berpisah dan memerdekakan diri begitu pula dengan Tiongkok. Jika suku Uighur berhasil memerdekakan diri maka akan menimbulkan masalah keamanan dan memicu wilayah lain yang masih bermasalah dengan Tiongkok ikut melakukan hal yang sama. Segala cara dilakukan oleh Tiongkok dalam usahanya mempertahankan hegemoni mereka, dimulai dari kualitas penduduk terus ditingkatkan dan kualitas pendidikan di Xinjiang diperbaiki. Semua itu dilakukan Tiongkok agar suku Uighur tidak terus bersikeras ingin mendirikan Turkistan Timur. Sehingga dengan begitu maka keamanan, keutuhan dan persatuan Tiongkok akan terus terjaga.

## **KESIMPULAN**

Hubungan antara Tiongkok dan suku Uighur pada awalnya memiliki hubungan yang cukup baik namun semenjak terjadinya pemberontakan An Lu-Shan hubungan diantara keduanya diwarnai konflik. Hubungan semakin memanas ketika tahun 1990 hingga 2016, banyak terjadi keributan yaitu mulai pemberontakan senjata, demonstrasi hingga tindakan-tindakan yang mampu mengancam persatuan dan keamanan wilayah. Konflik ini mendapatkan kecaman dari dunia Internasional yakni anggota delegasi PBB dan Amerika. Mereka merasa bahwa segala upaya yang dilakukan oleh Tiongkok adalah kekerasan kemanusiaan dan penindasan etnis. Alasan yang membuat Tiongkok dikecam adalah mereka merasa bahwa Tiongkok telah melakukan penahanan terhadap 1 juta orang yang kebanyakan dari suku Uighur di kamp

pengasingan di Xinjiang. Menanggapi hal tersebut Tiongkok berusaha membuktikan bahwa yang dilakukan di Provinsi Xinjiang bukan sebuah kejahatan kemanusiaan melainkan upaya untuk mempertahankan kepentingan nasional dan hegemoninya di wilayah tersebut serta sebagai bentuk upaya dalam melawan gerakan separatisme, terorisme dan ekstrimisme agama. Untuk mengendalikan situasi di Xinjiang pemerintah Tiongkok berusaha melakukan berbagai cara baik ditindak secara hukum hingga pendirian Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kerja. Semenjak didirikannya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kerja, aktivitas dari gerakan nasionalis seperti terorisme, separatisme dan ekstrimisme agama mengalami penurunan dan keadaan di provinsi Xinjiang mulai stabil. Selain itu, pendirian kamp ini diperlukan untuk menghindari Xinjiang dari segala terror yang mampu mengancam keamanan wilayah dan untuk mencegah ekstremisme agama, terorisme dan separatisme terus berkembang di wilayah ini.

## REFERENSI

- Amindomi, A. (2019, Desember 19). *BBC Indonesia*. Retrieved Agustus 23, 2020, from Muslim Uighur: Mengapa ormas Islam dan pemerintah Indonesia 'bungkam' atas dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang?: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50835364>
- Authenticated U.S. Government Information*. (2007). Retrieved Maret 3, 2019, from Congressional-Executive Commission on China: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-110hhrg38026/pdf/CHRG-110hhrg38026.pdf>
- BBC. (2018, Agustus 31). *BBC*. Retrieved Agustus 19, 2020, from UN 'alarmed' by reports of China's mass detention of Uighurs: <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-45364689>
- BBC Indonesia. (2019, Desember 4). *BBC Indonesia*. Retrieved Agustus 20, 2020, from China dibuat murka oleh langkah AS mengesahkan RUU Uighur: "RUU langgar hukum internasional, jahat dan memfitnah": <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50654205>
- BBC.com*. (2014, September 26). Retrieved Oktober 28, 2019, from Why is there tension between China and the Uighurs?: <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-26414014>
- BBCIndonesia.com*. (2009, Juli 19). Retrieved Januari 27, 2019, from Merunut Akar Masalah di Xinjiang: [http://www.bbc.co.uk/indonesian/indepth/story/2009/07/090713\\_uighuranalysis.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesian/indepth/story/2009/07/090713_uighuranalysis.shtml)
- Buckley, C., & Ramzy, A. (2019, Desember 9). *The New York Times*. Retrieved Agustus 20, 2020, from Facing Criticism Over Muslim Camps, China Says: What's the Problem?: <https://www.nytimes.com/2019/12/09/world/asia/china-camps-muslims.html>
- CNNIndonesia.com*. (2018, Desember 18). Retrieved Januari 2019, 27, from Jejak Konflik Etnis Uighur dan Pemerintah China: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181218161340-113-354593/jejak-konflik-etnis-uighur-dan-pemerintah-china>
- Garside, J., & Harrison, E. G. (2019, November 25). *The Guardian*. Retrieved Agustus 20, 2020, from UK calls for UN access to Chinese detention camps in Xinjiang: <https://www.theguardian.com/world/2019/nov/25/uk-calls-for-un-access-chinese-detention-camps-xinjiang>
- Global Times*. (2011, Februari 28). Retrieved Mei 28, 2020, from Other natural resources of Xinjiang : <http://www.globaltimes.cn/content/628349.shtml>
- Human Right Watch*. (2001, Oktober). Retrieved November 29, 2019, from China: Human Right Concern in Xinjiang: <https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/asia/china-bck1017.pdf>

- Issiyev, K. (n.d). Retrieved Oktober 27, 2019, from History of The Uighurs in Brief:  
[http://the\\_uighurs.tripod.com/hist.htm](http://the_uighurs.tripod.com/hist.htm)
- Jie, S., & Juecheng, Z. (2019, Desember 23). *Global Times*. Retrieved Juli 14, 2020, from Allegedly 'missing' Uyghurs found living normally:  
<https://www.globaltimes.cn/content/1174468.shtml>
- Kompas.com*. (2019, Oktober 8). Retrieved Agustus 17, 2020, from Diduga Terlibat Penindasan Uighur, 28 Entitas China Masuk Daftar Hitam AS:  
<https://yogyakarta.kompas.com/read/2019/10/08/14422561/diduga-terlibat-penindasan-uighur-28-entitas-china-masuk-daftar-hitam>
- Li, Y., Ni, C., & Zhao, X. (2008). Retrieved Januari 22, 2020, from The Status Quo and Prospects of Regional Economic Cooperation between China's Xinjiang and Neighboring Countries under the Framework of the Shanghai Cooperation Organization:  
<http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/view/1896>
- Mackerras, C. (2008). The Uighurs. *Cambridge*, 317-342.
- Maizlan, L. (2020, Juni 30). *Council on Foreign Relations*. Retrieved Agustus 20, 2020, from China's Repression of Uighurs in Xinjiang: <https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-repression-uighurs-xinjiang>
- Perlez, J. (2019, April 8). *The New York Times*. Retrieved Agustus 24, 2020, from With Pressure and Persuasion, China Deflects Criticism of Its Camps for Muslims:  
<https://www.nytimes.com/2019/04/08/world/asia/china-muslims-camps.html?auth=login-email&login=email>
- Pramadiba, I. M. (2020, Mei 23). *Tempo*. Retrieved Agustus 18, 2020, from Amerika Blacklist 30 Institusi dan Perusahaan Asal Cina : <https://dunia.tempo.co/read/1345652/amerika-blacklist-30-institusi-dan-perusahaan-asal-cina>
- Radio Free Asia*. (2009, Juli 9). Retrieved Oktober 21, 2019, from Who are the Uyghurs:  
[https://www.rfa.org/english/news/uyghur/uyghurs\\_facts-07092009163637.html/](https://www.rfa.org/english/news/uyghur/uyghurs_facts-07092009163637.html/)
- Saputra, Y. E. (2019, Juli 11). *Tempo*. Retrieved Maret 10, 2020, from 22 Negara Minta Cina Hentikan Penahanan Uighur di Xinjiang: <https://dunia.tempo.co/read/1223662/22-negara-minta-cina-hentikan-penahanan-uighur-di-xinjiang>
- Saputra, Y. E. (2019, Desember 25). *Tempo.co*. Retrieved April 29, 2020, from Laporan Cina Ungkap Akar Masalah di Xinjiang adalah Separatisme:  
<https://dunia.tempo.co/read/1287765/laporan-cina-ungkap-akar-masalah-di-xinjiang-adalah-separatisme/full&view=ok>
- The Economist*. (2019, Juli 27). Retrieved Agustus 19, 2020, from International reactions: Chinese actions in Xinjiang become a matter of international dispute:  
<https://www.economist.com/china/2019/07/27/chinese-actions-in-xinjiang-become-a-matter-of-international-dispute>
- The State Council The People's Republic Of China*. (2019, Maret 18). Retrieved April 30, 2020, from The Fight Against Terrorism and Extremism and Human Rights Protection in Xinjiang:  
[http://english.www.gov.cn/archive/white\\_paper/2019/03/18/content\\_281476567813306.htm](http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2019/03/18/content_281476567813306.htm)
- The Uyghur American Association*. (2012, Januari 17). Retrieved November 13, 2019, from About Uyghurs: <https://uyghuramerican.org/search/node/About%20Uyghurs>
- Thinglink. (2016). *Thinglink*. Retrieved Agustus 21, 2020, from China's Geography Features: <https://www.thinglink.com/scene/865581290697523205>

- Voa Indonesia. (2019, Juli 11). *Voa Indonesia*. Retrieved Agustus 18, 2020, from 22 Dubes PBB Kutuk Perlakuan China Terhadap Uighur: <https://www.voaindonesia.com/a/dubes-pbb-kutuk-perlakuan-china-terhadap-uighur/4995621.html>
- Wardhani, B. L. (2011). Respon China atas Gerakan Pan-Uyghuris di Provinsi Xinjiang. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 292-301.
- Wardhani, B. L. (2011, Desember 4). *Respons Cina atas Gerakan Pan-Uyghuris di Provinsi Xinjiang*. Retrieved November 20, 2019, from [http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-Lepasan%20Naskah%20%20\(292-301\).pdf](http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-Lepasan%20Naskah%20%20(292-301).pdf)
- Weijian, L. (2020, Juni 20). *Global Times*. Retrieved Juli 14, 2020, from Documentary deepens understanding of Xinjiang history, reality: <https://www.globaltimes.cn/content/1192215.shtml>
- Westcott, B., & Shelley, J. (2019, Juli 11). *CNN*. Retrieved Agustus 20, 2020, from 22 countries sign letter calling on China to close Xinjiang Uyghur camps: <https://edition.cnn.com/2019/07/11/asia/xinjiang-uyghur-un-letter-intl-hnk/index.html>
- World Economic Forum*. (2015, September 22). Retrieved Mei 26, 2020, from What can the New Silk Road do for global trade?: <https://www.weforum.org/agenda/2015/09/what-can-the-new-silk-road-do-for-global-trade/>
- Xin, L. (2019, Desember 27). *Global Times*. Retrieved Juli 14, 2020, from Xinjiang in safest period, wounds healing after three peaceful years: <https://www.globaltimes.cn/content/1175020.shtml>
- Xin, L. (2019, Desember 27). *Xinjiang in Safest Period, wounds healing after three peaceful years*. Retrieved Juli 14, 2020, from Global Times: <https://www.globaltimes.cn/content/1175020.shtml>
- Zhao, R. (2019, Oktober 22). *Berkeley Economic Review*. Retrieved Mei 15, 2020, from Persecution for Profit: China's Economic Strategy in Xinjiang: <https://econreview.berkeley.edu/persecution-for-profit-chinas-economic-strategy-in-xinjiang/>